

**KETERLIBATAN PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 BERDASARKAN TEORI EFEKTIFITAS HUKUM**

SKRIPSI

Oleh
Rhima Arifaturrosyida
NIM. 05020421054



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhima Arifatursyida
NIM : 05020421054
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilu Oleh Pejabat Yang Terlibat
Kampanye Berdasarkan Teori Efektifitas Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 April 2025

Saya yang menyatakan,



Rhima Arifatursyida
NIM. 05020421054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rhima Arifaturosyida

NIM. : 05020421054

Judul : Pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilu Oleh Pejabat Yang Terlibat
Kampanye Berdasarkan Teori Efektifitas Hukum

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 7 Mei 2025

Pembimbing,



Elva Imeldatur Rohmah, M.H
NIP. 199204022020122018



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rhima Arifaturosyida
NIM : 05020421054
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : rhimarosyi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Keterlibatan pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan teori efektifitas hukum

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Oktober 2025

Penulis

(Rhima Arifaturosyida)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan teori efektifitas hukum. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yang pertama bagaimana keterlibatan pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kedua, bagaimana keterlibatan pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan teori efektifitas hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan berasal dari studi literatur, meliputi peraturan perundang-undangan, serta berbagai referensi terkait. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif dan disajikan dalam model deskriptif, dengan tujuan untuk menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menilai penerapannya dalam konteks partisipasi pejabat negara dalam pemilu.

Hasil Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dilakukan oleh pejabat negara dalam kegiatan kampanye serta mengkaji pelanggaran tersebut berdasarkan teori efektivitas hukum. Berdasarkan kajian yuridis terhadap ketentuan dalam pasal 281, 282, dan 299–305 UU Pemilu, ditemukan bahwa banyak pejabat negara, termasuk menteri dan presiden, terindikasi melanggar aturan mengenai penggunaan fasilitas negara dan kewajiban cuti selama masa kampanye. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan lemahnya implementasi aturan hukum dan kurangnya efek jera bagi pelaku, yang menyebabkan rendahnya efektivitas hukum dalam konteks pemilu. Melalui pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten guna menjaga netralitas aparatur negara serta menjamin keadilan dan integritas dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Dari hasil penelitian tersebut maka kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan tanpa diskriminasi, agar dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Proses hukum yang adil akan menjadi salah satu indikator keberhasilan implementasi teori efektivitas hukum dalam konteks pemilihan umum.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN FIQH SIYASAH	
DUSTURIYAH.....	17
A. Teori Efektivitas Hukum	17
B. Teori Siyasah Dusturiyah	21
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	21
2. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah	23
3. Ruang Lingkungan Kajian Siyasah Dusturiyah	26
BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2024 DAN	
KETERLIBATAN PEJABAT NEGARA.....	29
A. Pelaksanaan Pemilu 2024	29
1. Latar Belakang pemilu	29
2. Regulasi dan Kerangka Hukum Pemilu 2024	33

B. Keterlibatan Pejabat Negara Dalam Pemilu 2024	36
1. Definisi dan Ruang Lingkup Pejabat Negara	36
2. Aturan Keterlibatan Pejabat Negara Sebagai Pelaksana Kampanye 37	
3. Tabel Perbedaan Antara Undang-Undang Pemilu	44
4. Contoh Kasus Keterlibatan Pejabat Negara Pada Kampanye Pemilu 2024	45
BAB IV ANALISIS PELANGGARAN PEJABAT NEGARA YANG TERLIBAT KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM 2024	50
A. Analisis Pelanggaran Pejabat Negara yang Terlibat Kampanye Pemilu 2024 dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	50
B. Analisis Pelanggaran Pejabat Negara yang Terlibat Kampanye Pemilu 2024 dalam UU No. 7 Tahun 2017 Berdasarkan Teori Efektifitas Hukum	58
C. Analisis keterlibatan Pejabat Negara Dalam Pemilihan Umum 2024 Dalam Prespektif Siyasah Dusturiyah.	63
BAB V KESIMPULAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Antara Undang-Undang Pemilu	44
Tabel 2. Contoh Kasus Keterlibatan Pejabat Negara pada Kampanye Pemilu	45



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodri, Azizy. *Evolusi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Adriyani, Yuyun. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara" (2021).
- Alex. *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*. Surabaya: Karya Harapan, 2005.
- Al-Jawahir, Ahmad. "Peran Hadist Dalam Menafsirkan Al-Qur'an." *Studi Islam* Vol. 12 No. 2 (2020).
- Al-Jundi, M. "Konsep Ijma' Dalam Islam Dan Implikasinya Terhadap Hukum Kontemporer" Vol. 5 No. 2 (2021).
- Anggraeni, Dista, and Novi Damayanti. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia" Vol. 1 No. 2 (December 2022).
- Aspinall, Edward. *Menentang Suharto: Kompromi, Perlawanan, Dan Perubahan Rezim Indonesia*. Stanford University Press, 2005.
- Asshiddiqi, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Atmasasmita, Romli, and Kodrat Wibowo. *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenandamedia Group, 2016.
- . *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenandamedia Group, 2016.
- Bisri, Ilham. "Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia" (n.d.).
- Budiarjo, Meriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- . *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- DPR-RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum*, n.d.

Dzajuli. *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

———. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

———. *Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Dzajuli, A. *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Iqbal, Muhamad. *Fiqih Siyasah, Konstektual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

———. *Fiqih Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

———. *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

———. *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

———. *Fiqih Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Ismail, Muhammad. “Siyasah Dusturiyah Dalam Al-Qur’andan Implementasinya Dalam Negara Islam.” *Jurnal Pemikiran Islam* Vol.10 No. 1 (2018).

kompas.com. “Bagi-Bagi Bansos Di Musim Kampanye Diduga Menyandera Rakyat,” n.d. Accessed March 5, 2025. <https://nasional.kompas.com>.

kpu.go.id. “Perkembangan Teknologi Buat Pemilu 2024 Efektif, Berintegritas,” n.d. Accessed March 18, 2025. <https://www.kpu.go.id>.

Lemhannas.go.id. “Pemilu 2024 Waktunya Demokrasi Gagasan, Bukan Demokrasi Pengultusan,” n.d. Accessed February 10, 2025. www.lemhannas.go.id.

———. “Pemilu 2024 Waktunya Demokrasi Gagasan, Bukan Demokrasi Pengultusan,” n.d. Accessed February 10, 2025. www.lemhannas.go.id.

M Steers, Richard. *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Mannan, Husnul. “Analisis Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Implementasi Pada Pemilu 2019 Di Pidie Jaya” (2021).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010.
- Nafis Gumay, Hadar. *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2023.
- Novianto. “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara” Vol. 7 No. 2 (2016).
- Orlando, Galih. *Efektifitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*. 1st ed. Vol. 6. Labuhan Batu: Tarbiyatul, 2022.
- Pahlevi, Indra. “Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia.” *politica* 5 (November 2014): 111–114.
- . “Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia.” *politica* Vol. 5 (November 2014): hlm 113.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Republik Indonesia, Kementerian Keuangan. “Pentingnya Netralitas Pegawai ASN Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Untuk Pemilu Damai,” n.d. Accessed February 10, 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>.
- . “Pentingnya Netralitas Pegawai ASN Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Untuk Pemilu Damai,” n.d. Accessed March 1, 2025. <https://www.jkn.kemenkeu.go.id>.
- Republika. “Dianggap Berpihak Pada Pemilu 2024 Jokowi Disebut Tabrak Tiga UU,” n.d. Accessed February 5, 2025. <https://news.republika.co.id>.
- Reza, Citra. *Keterlibatan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024 Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.
- RI, DKPP. “Penyelenggaraan Pemilu Di Dunia Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut System Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parleментар,” n.d.

Sani, Rafif, M. Wildan Mufti, Gathan Shastyan, Rendika Purnama, Razky Fawwaz, and Yuliana Yuli. "Implikasi Pejabat Publik Berkampanye Dalam Kontestan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden" 1 (2014).

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1988.

———. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.

———. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

———. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

———. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Humu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

———. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Sudiharto, A. *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Teguh, prasetyo, and Abdul Halim Berkatullah. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.

tempo.co.id. "Jokowi Dilaporkan Ke Bawaslu Butut Acungkan Dua Jari Di Mobil Dinas RI 1," n.d. Accessed February 10, 2025. <https://www.tempo.co>.

———. "Kontroversi Pernyataan Jokowi: Presiden Boleh Memihak Dan Berkampanye," n.d. Accessed February 10, 2025. <https://www.tempo.co>.

———. "Mendag Dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Terbukti Langgar Administrasi Pemilu 2024, Ini Kronologi Dan Sanksi Bawaslu," n.d. Accessed February 10, 2025. <https://www.tempo.co>.

———. "Ramai Akun X Kemenhan Cuit Tagar Prabowo-Gibran 2024," n.d. Accessed February 10, 2025. <https://www.tempo.co>.

Tisnawati Sule, Ernie, and Kurniawan Saefullah. *Pengantar Menejemen*. Jakarta: Kencana, 2010.

Umum, Komisi Pemilihan. *Pedoman Pemilu Yang Demokratis*, n.d.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Wahid, and Fadhillah. "Asas Netralisasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Negara." *Jurnal Civil Service* Vol.16 No. 2 (2022).

Wahyudi, Irfan. *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

"Jokowi: Presiden Boleh Kampanye Dan Memihak Di Pilpers 2024." *Kompas Tv*, n.d. Accessed March 5, 2025. <https://www.Kompas.Tv>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)-Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Repiblik Indonesia, n.d.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, n.d.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, n.d.

"Sivitas Akademik UGM Sampaikan Petisi Kritikan, Jokowi: Itu Hak Demokrasi," n.d. Accessed March 5, 2025. <https://nasional.kompas>.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat 1, n.d.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2, n.d.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Entang Pemilihan Umum, n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilhan Umum, n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 3, n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 281, n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 281., n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 299, n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 300, n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 301, n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 302, n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 303, n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 304, n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 305, n.d.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan, Pasal 1 Angka 7, n.d.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan, Pasal 1 Angka 8, n.d.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, n.d.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A